



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SUWARNI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **758924**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **546.380.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/60 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/135 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 301.380.000
3. Tanah Seluas 261 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **204.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CAA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA X1802N0420 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **12.500.000**

D. SURAT BERTAHAGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **184.192.418**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **947.072.418**

III. HUTANG Rp. **50.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

897.072.418

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.